



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2018/PA.Lrt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah (*Itsbat Nikah*) yang diajukan oleh:

Imran Horan Naran bin Samsudin, tempat tanggal lahir, Sabah, 17 Oktober 1992, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Dusun IV, RT.020/RW.010, Desa Oringbele, Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut Pemohon I;

Sindiana Niga Bakan binti Kamilus, tempat tanggal lahir, Sabah, 3 September 1996, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun IV, RT.020/RW.010, Desa Oringbele, Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka di bawah Register Nomor 20/Pdt.P/2018/PA.Lrt, pada tanggal 14 Maret 2018, telah mengajukan permohonan istbat nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I Pemohon II telah menikah pada tanggal 15 Oktober 2015 di Desa Oringbele, Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores

Pntpn. No. 20/Pdt.P/2018/PA.Lrt. Hal. 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, dengan wali nikahnya Bertahkim kepada Imam Masjid yang bernama **Ansar Boro Tura bin Hasan** serta disaksikan oleh Rusdin bin Ahmad dan Anwar bin Jafar, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Desa Oringbele sampai sekarang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama:
3.1. Ahmad Syarif bin Imran, laki-laki, umur 2 tahun;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam;
5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/ masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya karena tidak ada biaya. Oleh karenanya, Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Larantuka, guna untuk mendapatkan buku Nikah dan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai penghasilan tetap dan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam rumah tangga, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq. Majelis Hakim, kiranya berkenan memeriksa dan menetap sebagai berikut:-

PRIMER;-

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Imran Horan Naran bin Samsudin**) dengan Pemohon II (**Sindiana Niga Bakan binti Kamilus**) yang dilaksanakan pada 15 Oktober 2015 di Desa Oringbele, yang ada di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur;

Pntpn. No. 20/Pdt.P/2018/PA.Lrt. Hal. 2 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER:

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari, sejak tanggal 19 Maret 2018 s/d tanggal 02 April 2018 dengan cara menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Larantuka dan ternyata selama pengumuman tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran-saran dan nasehat kepada para Pemohon untuk mengurus administrasi perkawinan para Pemohon di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat serta mempertimbangkan baik-buruknya tentang permohonan itsbat nikah tersebut, dan para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan tidak mampu dan mengajukan permohonan agar dibebaskan dari biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara untuk berpekar secara Cuma-Cuma (Prodeo) yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Larantuka Nomor 20/Pdt.P/2018/PA.Lrt, tanggal 14 Maret 2018, maka kepada para Pemohon diizinkan untuk berpekar secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada perubahan maupun penambahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I **Imran Horan Naran** Nomor: 5306121710920001, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah

Pntpn. No. 20/Pdt.P/2018/PA.Lrt. Hal. 3 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Flores Timur, tanggal 12 Januari 2013, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos dan sudah dicocokkan dengan Aslinya, bukti surat tersebut diberi tanda (Bukti P.1);

2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Sindiana Niga Bakan binti Kamilus** Nomor: 5306124107990010, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Flores Timur, tanggal 09 Februari 2015, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos dan sudah dicocokkan dengan Aslinya, bukti surat tersebut kemudian diberi tanda (Bukti P.2);

B. Saksi:

Menimbang, bahwa disamping surat bukti sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yaitu:

1. **Anwar Jafar bin Abdullah**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.005/ RW.003, Desa Lamabelawa, Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur; Bahwa saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena ada hubungan dengan Pemohon I sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2015 di Desa Oringbele Kecamatan Witihama;
 - Bahwa saksi yakin pernikahan para Pemohon dilaksanakan secara syari'at Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Wali Tahkim yaitu Imam Masjid yang bernama Ansar Boro Tura bin Hasan sedangkan orang tua Pemohon II beragama Katholik, disaksikan oleh Rusdianto bin Ahmad dan Anwar Jafar bin Abdullah, dengan maskawin seperangkat alat solat dibayar tunai;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda dan tidak ada protes yang muncul

Pntpn. No. 20/Pdt.P/2018/PA.Lrt. Hal. 4 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari masyarakat yang mempersoalkan keabsahan perkawinan mereka, dan mereka tetap beragama Islam;

- Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah status Pemohon I Jejaka dan Pemohon II Perawan;
- Bahwa saksi tahu selama perkawinan antara para Pemohon belum pernah bercerai dan hidup rukun serta dalam perkawinannya mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena tidak ada biaya untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Witihamu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk bukti pernikahan para Pemohon dan mendapatkan Buku nikah dan untuk mengurus Akta kelahiran anaknya;

2. Rusdianto bin Ahmad, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.005/ RW.003, Desa Oringbele, Kecamatan Witihamu, Kabupaten Flores Timur, saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah di rumah orang tua Pemohon I di Desa Oringbele Kecamatan Witihamu pada tanggal 15 Oktober 2015 yang lalu;
- Bahwa saksi yakin pernikahan para Pemohon dilaksanakan secara syari'at Islam, dengan wali nikahnya adalah Wali Tahkim Imam Masjid yang bernama Ansar Boro Tura bin Hasan sedangkan orang tua Pemohon II beragama Katholik, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Rusdianto bin Ahmad dan Anwar Jafar bin Abdullah, dan dengan maskawin seperangkat alat solat dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah status Pemohon I Jejaka dan Pemohon II Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda dan tidak ada protes yang muncul

Pntpn. No. 20/Pdt.P/2018/PA.Lrt. Hal. 5 dari 13



dari masyarakat yang mempersoalkan keabsahan perkawinan mereka, dan mereka tetap beragama Islam;

- Bahwa saksi tahu selama perkawinan antara para Pemohon belum pernah bercerai dan hidup rukun serta dalam perkawinannya mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya karena kendala biaya untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Witihamas;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk bukti pernikahan para Pemohon dan untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus Akta kelahiran anaknya dan untuk keperluan perdata lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut para Pemohon telah membenarkannya dan menyatakan tidak ada lagi hal-hal lain yang akan disampaikan di depan persidangan dan para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan *Itsbat Nikah* para Pemohon adalah tentang pernikahan dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan para Pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Larantuka, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Pntpn. No. 20/Pdt.P/2018/PA.Lrt. Hal. 6 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, sejalan pula dengan ketentuan pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka secara formil permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada para Pemohon supaya mempertimbangkan segala hal mengenai permohonan istbat nikah ini akan tetapi para Pemohon tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini ialah para Pemohon memohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan secara Syari'at Islam pada tanggal 15 Oktober 2015 di Desa Oringbele Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur dapat diisbatkan dengan alasan belum mempunyai Buku Akta Nikah sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat-surat bukti berupa bukti P.1, dan bukti P.2 serta 2 orang Saksi seperti tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa bukti surat (P-1) dan (P-2) adalah berupa Kartu Tanda Penduduk sebagai bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk kabupaten Flores Timur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Larantuka, oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Larantuka sesuai ketentuan Pasal Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.2 adalah Akta Otentik yang telah bermaterai cukup yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menjelaskan tempat Domisili para Pemohon, oleh karena itu bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya bukti tersebut telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, para Pemohon telah pula mengajukan bukti 2 orang saksi masing-masing bernama **Anwar Jafar bin Abdullah** dan **Rusdianto bin Ahmad**, yang

Pntpn. No. 20/Pdt.P/2018/PA.Lrt. Hal. 7 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Pemohon yaitu sebagai tetangga Pemohon I, para saksi sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi telah menerangkan di depan sidang dibawah sumpahnya menyampaikan bahwa para Pemohon telah menikah secara Agama Islam pada tanggal tanggal 15 Oktober 2015 di Desa Oringbele Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur dengan Bertahkim kepada Imam Masjid yang bernama Ansar Boro Tura bin Hasan sedangkan orang tua kandung Pemohon II beragama Katholik, serta disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Rusdianto bin Ahmad dan Anwar Jafar bin Abdullah dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan/bukti 2 (dua) orang saksi tersebut, bukti mana didukung oleh keduanya yang sampai saat perkara ini diajukan para Pemohon masih tinggal bersama dalam satu rumah tangga dan keduanya sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, serta selama berumah tangga tidak ada reaksi negatif dari warga masyarakat setempat serta tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan perkawinan mereka, hal ini menunjukkan bahwa para Pemohon telah diakui dan dibenarkan statusnya sebagai suami isteri baik oleh warga masyarakat maupun oleh Pemerintah setempat.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut adalah termasuk orang yang tidak dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dan keterangan saksi para Pemohon adalah merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172, 175 RBg dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima;

Pntpn. No. 20/Pdt.P/2018/PA.Lrt. Hal. 8 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, surat-surat bukti, dan keterangan 2 orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 Oktober 2015 di Desa Oringbele dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur, dengan Bertahkim kepada Imam Masjid yang bernama Ansar Boro Tura bin Hasan, karena orang tua Pemohon II beragama KAtholik dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Rusdianto bin Ahmad dan Anwar Jafar bin Abdullah, dengan maskawin seperangkat alat solat dibayar tunai;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan (*bakda dukhul*), sudah mempunyai 1 (satu) orang anak, tidak pernah bercerai dan hidup rukun, serta sudah mempunyai anak dan tetap dalam Agama Islam dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat karena para Pemohon tidak ada biaya dan dari keluarga yang tidak mampu;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk bukti pernikahan para Pemohon guna dijadikan sebagai alasan Hukum untuk memperoleh Akta Nikah dan mengurus Akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan fakta tersebut di atas, harus dinyatakan telah terbukti bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dengan terpenuhi 5 (lima) rukun nikah sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan mana dalam perkara a quo ke 5 (lima) rukun nikah tersebut benar-benar telah dipenuhi oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta dan kesimpulan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2015 di Desa Oringbele Kecamatan Witihama, telah dilaksanakan dengan ketentuan hukum Islam dengan wali

Pntpn. No. 20/Pdt.P/2018/PA.Lrt. Hal. 9 dari 13



nikahnya adalah Wali Tahkim dikarenakan orang tua Pemohon II beragama Katholik, dengan dihadiri dua orang saksi dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai, tidak ada halangan perkawinan menurut hukum atas pernikahan para Pemohon, dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka maka dengan demikian pernikahan para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan keterangan para saksi, dimana terbukti alasan Pemohon tidak mendaftarkan atau mencatatkan perkawinannya di KUA kecamatan setempat bukan disebabkan faktor kelalaian Pemohon yang tidak mengetahui dan memahami urgensi dari pencatatan perkawinannya untuk mendapatkan jaminan dan kepastian hukum akan status perkawinan para Pemohon, akan tetapi disebabkan oleh faktor ketidakmampuan para Pemohon dalam hal ekonomi karena para Pemohon hanya sebagai petani dan faktor geografis dimana letak keberadaan KUA yang jauh dari tempat kediaman Pemohon serta minimnya sarana transportasi pada saat itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat kelalaian yang bersifat administrasi tersebut sudah beralasan dan tidak melawan hukum karena Pemohon memiliki itikad baik untuk mengajukan permohonan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan ini dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pemohon memiliki itikad baik untuk membangun rumah tangga bahagia, menatap masa depan keluarga yang lebih baik dan mengharapkan pernikahannya mendapat kepastian hukum yang jelas sehingga pengurusan administrasi yang terkait dengan keturunannya dapat berjalan dengan lancar dan tertib, maka permohonan Pemohon patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daraqutny dari Siti Aisyah yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي و شاهدى عدل

Pntpn. No. 20/Pdt.P/2018/PA.Lrt. Hal. 10 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Dan pendapat ulama yang terdapat dalam Kitab I'natuth Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin yang sebagai berikut :

Dan Hadits Rasulullah saw. Diriwayatkan oleh Abu Daud, At Turmuzi dan Ibnu Hibban :

السلطان ولي من لا ولي له

Sultan (Pemerintah) adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali. (diriwayatkan oleh Abu Daud, At Turmuzi dan Ibnu Hibban).

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى
(وشاهدين عدلين (إعانة الطالبين ٤:٢٥٤)

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan syarat-syaratnya perkawinan seperti wali dan dua orang saksi yang adil." (I'natut Thalibin IV : 254).

الصحة ما إجتمع فيه الشروط والاركان و لا يوجد فيه ما نع من
موانع الشرع Artinya : Sesuatu dipandang sah apabila telah terpenuhi syarat dan

rukunnya, serta tidak ada halangan-halangan syara' yang membatalkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah ditemukan fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan permohonan para Pemohon dipandang telah beralasan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2015 di Desa Oringbele dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur, harus dinyatakan sah, karena perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu" dan sejalan pula dengan pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan para

Pntpn. No. 20/Pdt.P/2018/PA.Lrt. Hal. 11 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagaimana tercantum pada petitum surat permohonan pada angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, untuk tertib administrasi dan memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara untuk berpekar secara Cuma-Cuma (Prodeo) yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Larantuka Nomor 20/Pdt.P/2018/PA.Lrt, tanggal 14 Maret 2018, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka tahun anggaran 2018;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Imran Horan Naran bin Samsudin**) dengan Pemohon II (**Sindiana Niga Bakan binti Kamilus**) yang dilaksanakan pada 15 Oktober 2015 di Desa Oringbele, wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka tahun anggaran 2018 sejumlah Rp 356.000,- (Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Larantuka di Kantor Urusan Agama Kecamatan Witihama, pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1439 Hijriyah oleh kami: H. Tamim, S.H., sebagai Ketua Majelis, Nikmawati, S. H.I., M.H., dan M. Jimmy Kurniawan. S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut,

Pntpn. No. 20/Pdt.P/2018/PA.Lrt. Hal. 12 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sakinah Al Hamidy S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

H. Tamim, S.H.,

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Nikmawati, S. H.I., M.H.,

M. Jimmy Kurniawan. S.H.I.,

Panitera Pengganti

Sakinah Al Hamidy, S.H.,

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| 1. Biaya Panggilan | : Rp. 300.000,00,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00,- |
| 3. Biaya Meterai | : Rp. <u>6.000,00,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 356.000,00,- |

(Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Pntpn. No. 20/Pdt.P/2018/PA.Lrt. Hal. 13 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)